

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
DALAM RANGKA MENJAGA AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**PATRISIUS BASA**

**2016110159**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2020**

## **Ringkasan**

Judul penelitian ini adalah “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Rangka Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang”, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan dan cara menjaga atau menjalankan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKD) Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah Kabupaten Malang, terdiri atas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Serta agar terwujudnya akuntabilitas laporan keuangan daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

**Kata Kunci:** *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ruang publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya permintaan pertanggungjawaban pada tempat-tempat terbuka, baik di tingkat lokal maupun pusat (Sudarsono, 2016). Tanggung jawab/akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu jenis komitmen untuk memikul tanggung jawab atas pencapaian atau kekecewaan dari pelaksanaan tujuan utama asosiasi untuk mencapai tujuan dan fokus pada yang telah ditetapkan baru-baru ini, melalui wahana tanggung jawab yang diselesaikan secara terputus-putus (Sudarsono, 2016).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berpusat pada aturan/daerah memberikan kekuasaan yang luas, tulus dan penuh perhatian kepada daerah. Pencapaian pelaksanaan kemandirian daerah pada umumnya ditentukan oleh status dan kapasitas kabupaten yang sebenarnya dalam mengawal dan memberdayakan setiap potensi dan aset yang dapat diakses (Untary, 2014). Sulit bagi pemerintah terdekat untuk memperoleh Penilaian Tidak Memadai (WTP) dari kelompok peninjau BPK, baik secara santai atau radikal.

Namun, kondisi buruk ini tidak dapat diabaikan, itu membutuhkan upaya dan tanggung jawab dari berbagai kelompok dan sudut yang juga menentukan sifat data dari laporan keuangan pemerintah setempat. Kualitas subjektif dari laporan fiskal adalah mengatur langkah-langkah yang harus dikemas dalam

data pembukuan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas subjektif dari laporan anggaran pemerintah yang menjadi standarisasi penting sebagaimana dinyatakan dalam Struktur Teoritis Pembukuan Badan Publik Undang-undang Tidak Resmi Nomor 24 Tahun 2005 meliputi: relevan, solid, sama, dan dapat dipertanggungjawabkan (Armando, 2013). Tidak semua pemerintah lingkungan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PERMENDAGRI ) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Aturan Penatausahaan Dana Daerah Selanjutnya, administrasi dan tanggung jawab keuangan daerah tidak secara sistematis.

Pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tidak memadai antara lain, pertukaran moneter daerah yang belum terdata secara lengkap dalam rangkuman anggaran, ukuran kesiapan laporan yang tidak sesuai dengan pengaturan, dan perencanaan laporan fiskal pemerintah daerah yang tidak semua menyinggung. dengan Pedoman Pembukuan Pemerintah (SAP). Selain itu, pengawasan oleh Badan Pemeritah Daerah/Kota belum ideal sehingga wajar jika ditemukan penemuan Badan Pengkajian Unggulan (BPK) yang diulang-ulang dan lambat untuk ditindaklanjuti (Kurnia, 2013).

Untuk membatasi penyimpangan dalam penatausahaan dana negara, diperlukan standar pembukuan administrasi yang diatur oleh PP. 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembukuan Pemerintah. Penggunaan PP No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Uang Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan perkiraan gaji dan konsumsi berdasarkan pungutan belum dilaksanakan, maka penerimaan dan perkiraan berdasarkan

uang digunakan paling lama 5 (lima) waktu. Dengan demikian, PP No. 24 Tahun 2005 telah dikoreksi dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukuan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Uang Negara. Dalam pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa norma-norma pembukuan administrasi disiapkan oleh kelompok penasehat pedoman bebas dan ditentukan oleh undang-undang tidak resmi setelah terlebih dahulu memperoleh pemikiran dari Kantor Peninjauan Yang Tak Tertandingi. Derajat pengungkapan ikhtisar fiskal tidak dapat mengarahkan hubungan antara perkembangan penerimaan dan sifat laporan moneter, dan selain itu tingkat keterpaparan bukanlah pertimbangan utama resensi dalam memutuskan kesusilaan (Surjono, 2017).

Laporan keuangan sangat penting untuk diberikan kepada wali karena melalui laporan keuangan, wali dapat mengetahui situasi keuangan asosiasi dan dapat memutuskan pilihan tertentu untuk membantu kesesuaian sebuah asosiasi. Laporan moneter adalah tampilan keterusterangan dan tanggung jawab suatu substansi (Albugis, 2016).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun mendapat penilaian sebagai penilaian dari Badan Administrasi Moneter ( BPK ). Ada empat kesimpulan yang diberikan oleh analis, khususnya: Unfit Assessment (WTP), Inadequate Assessment (WDP), Inadequate Assessment (TP), dan Proklamasi Penolakan untuk Menawarkan Perspektif atau Disclaimer of Assessment (TMP).

Laporan keuangan adalah jenis kejelasan dan tanggung jawab suatu elemen seperti halnya media data pembukuan untuk memiliki opsi untuk meneruskan konsekuensi dari pelaksanaan administrasi moneter ke pertemuan lain. Sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukuan Pemerintah; Data dalam rangkuman fiskal pemerintah seharusnya bernilai jika data tersebut memenuhi aturan dalam pembukuan pemerintah, bersifat spesifik penting (*pertinence*), dapat diandalkan (*unwavering quality*), dapat dipertanggungjawabkan (*dipahami*) dan dapat diukur (*likeness*). Pembukuan keuangan daerah berperan penting dalam mengawasi dana daerah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya (Mokoginta, 2017).

Pembukuan moneter adalah pembukuan strategi moneter yang biasanya mendapat perhatian dengan kapasitas bantuan yang luar biasa. Laporan moneter menghasilkan citra eksplorasi yang dapat diandalkan. Hal penting dari pemanfaatan pembukuan dalam perencanaan ikhtisar fiskal provinsi adalah kerangka pembukuan. Kerangka kerja pembukuan moneter teritorial adalah perkembangan metodologi mulai dari cara yang paling umum untuk mengumpulkan informasi, mencatat, menyimpulkan dan mengumumkan keuangan sehubungan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan pendapatan provinsi dan menggunakan rencana keuangan yang mungkin secara fisik atau menggunakan aplikasi PC. (Permadi, 2013).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah kerangka kerja pembukuan yang mencakup cara paling umum untuk pencatatan, pengelompokan, penguraian, penjumlahan pertukaran atau peristiwa moneter serta perincian moneter

sehubungan dengan pelaksanaan APBD (Utama, 2017). Dengan cara ini, mengingat fondasi yang telah digambarkan, para pencipta tertarik untuk mengarahkan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Rangka Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang sudah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
2. Bagaimana cara menjaga atau menjalankan akuntabilitas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui cara menjaga atau menjalankan akuntabilitas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Instansi Tempat Penelitian
  - a. Sebagai referensi tentang pentingnya sistem akuntansi keuangan agar dapat memudahkan badan kepegawaian daerah untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan yang baik.

b. Memberi masukan kepada Pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam hal sistem akuntansi keuangan daerah

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Untuk meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan dan memantapkan pengetahuan serta keterampilan dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah pada instansi daerah

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi/panduan untuk melanjutkan penelitian atau untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana cara menjaga atau menjalankan akuntabilitas laporan keuangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Albugis, F. F. (2016, september). penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah propinsi sulawesi utara. *EMBA*, 078-089.
- Armando, G. (2013). *pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Budi Mulyana. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1Mei 2006, (65-78).
- Haryanto dkk, (2007), *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kurnia, I. (2013, 03). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuanga*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Machmud, Rizan. 2013. Hubungan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan dengan Kinerja Pegawai pada Rutan Makassar. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi2. Penerbit Andi.Yogyakarta.
- Mokoginta, N. (2017). pengaruh sistem penengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Riset Akuntansi Going Concern*, 874-890.
- Permadi, A. D. (2013, Juni). *pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuagan pemerintah daerah*. Bandung: Universitas Widiatama.
- Sudarsono, G. (2016, Oktober 19). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Kab.Grobogan.
- Surjono, W. (2017). pengarus sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada satuan kerja dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten bandung. *riset akuntansi dan keuangan*, 1.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Untary, N. R. (2014, Desember 22). pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi.
- Utama. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu).
- Wibisono (2013). "Analisis Dan Implementasi Access Point Pada Pt. Selaras Citra Terabit Menggunakan Software The Dude". Skripsi. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer, Amikom. Yogyakarta.